

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKA

Hattami Amar¹, Darol Arkum²

^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Institut Pahlawan 12 Sungailiat

Email: darolarkumugm@gmail.com

abstrak

Salah satu indikator kemajuan suatu negara atau daerah dalam membangun wilayahnya adalah berhasilnya menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangka. Jenis penelitian bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif menggunakan model *Sequential Explanatory*. Pengumpulan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, pengumpulan data primer melalui wawancara dan Fokus Grup Diskusi dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka periode 2013-2022. Tidak signifikannya pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan disebabkan para penganggur bukan dari kalangan penduduk miskin. Kesimpulannya bahwa penurunan tingkat kemiskinan merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, yakni Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, kelurahan/Desa serta pihak swasta dan masyarakat. Melalui berbagai program/kegiatan pemberdayaan ekonomi dan berbagai bantuan yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi tingkat kemiskinan. Masyarakat tak mampu perlu diberdayakan dengan membangun budaya swadesi melalui penyebaran pengetahuan teknik pembuatan barang dan jasa secara mandiri, lewat jalur pendidikan/pemasyarakatan serta memperbesar investasi padat pekerja berkesinambungan.

Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB, IPM, Pengangguran

Abstract

One indicator of a country's or region's progress in developing its region is its success in reducing poverty levels. The aim of this research is to see the influence of Gross Regional Domestic Product, Human Development Index, Unemployment Rate on Poverty Levels in Bangka Regency. This type of research is a combination of quantitative and qualitative using the Sequential Explanatory model. Secondary data collection from the Central Statistics Agency, primary data collection through interviews and Focus Group Discussions with relevant sources. The research results show that GRDP & HDI partially have a negative and significant effect on the poverty level, while the unemployment rate has a positive but not significant effect on the poverty level in Bangka Regency for the 2013-2022 period. The insignificant influence of the unemployment rate on the poverty rate is because the unemployed are not from the poor population. Conclusion The reduction in poverty levels is the result of collaboration between various parties, namely the Central Government, Provinces, Districts, sub-districts/villages as well as the private sector and the community. Through various economic empowerment programs/activities and various assistance that have been carried out in order to overcome poverty levels. Underprivileged communities need to be empowered by building a culture of self-reliance through the dissemination of knowledge of techniques for producing goods and services independently, through educational/socialization channels and increasing sustainable labor-intensive investment.

Keywords: Poverty, GRDP, HDI, Unemployment

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu yang sangat urgen, disebabkan kemiskinan terjadi di setiap negara baik di negara kaya, negara maju dibidang industri dan teknologi sekalipun. Sehingga topik kemiskinan masih relevan untuk dikaji dalam rangka menemukan solusi cara menanggulangnya. Kemiskinan menjadi target utama dalam capaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikenal dengan istilah 5P adalah *People, Prosperity, Partnership, Peace, and Planet*. P yang pertama adalah *People* atau manusia, dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. Pakar lingkungan Emil salim, mendefinisikan kemiskinan adalah suatu keadaan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Selanjutnya Prof. Mubyarto, menyatakan kemiskinan ditandai rendahnya taraf hidup masyarakat di pedesaan maupun diperkotaan.(Cangara, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan baik dari sisi budaya, sosial, ekonomi dan iklim dan lain-lain. Ragnar Nurkse, yang terkenal dengan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah persoalan sosial seperti tiga lingkaran yakni pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita yang merupakan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Rank, Yoon dan Hirschl melalui teori struktural menyatakan penyebab kemiskinan adalah tata kelola pemerintahan dibidang sosial ekonomi. Artinya ada kegagalan pasar kerja untuk menyediakan jumlah pekerjaan yang layak, sehingga terjadi pengangguran. Dalam teori pembangunan penyebab kemiskinan dilihat dari persoalan ekonomi, adalah kurangnya modal, kemampuan manajerial, prasarana untuk peningkatan ekonomi. Sehingga kemiskinan akan hilang bila pasar diperluas dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi tingginya melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Cangara, 2020). Penyebab dan akibat dari adanya kemiskinan di negara berkembang menurut Jhingan adalah; pertama adalah prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian. kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi tradisional, penguasaan lahan rata-rata per petani cukup sempit sehingga mereka terpaksa hidup dengan kondisi apa adanya (Roy Hendra, 2010).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan, diantaranya (Andhykha *et al.* 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. (Leonita & Kurnia Sari, 2019) laju PDRB berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kemiskinan di Indonesia. (Sussy Susanti, 2013) PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011. (Maftuh Bahrul Ilmi, 2021) menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Lima Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Periode 2010-2019. (Sari Putri Indah *et al.* 2021) menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik.

Penelitian tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan, diantaranya (Andhykha *et al.* 2018), menyatakan IPM berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2018. (Sussy Susanti, 2013) IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011. (Maftuh Bahrul Ilmi, 2021) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Lima Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Periode 2010-2019. (Sari Putri Indah *et al.* 2021), menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik. (Leonita & Kurnia Sari, 2019) menyatakan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian tentang pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, diantaranya (Andhykha *et al.* 2018) temuannya tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2018. (Sari Putri Indah *et al.*, 2021), tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik. (Sussy Susanti, 2013) Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011. (Maftuh Bahrul, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Lima Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Periode 2010-2019. (Leonita & Kurnia Sari, 2019) tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota, akan di sajikan pada tabel berikut:

Tabel.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota tahun 2013-2022 (persen)

Uraian										
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
INDONESIA	9,54	10,14	9,78	9,41	9,82	10,64	10,86	11,22	11,25	11,37
BANGKA BELITUNG	4,45	4,9	4,53	4,62	5,25	5,2	5,22	5,4	4,97	5,25
Bangka	4,26	4,81	4,51	4,92	5,47	5,1	5,52	5,63	5,2	5,40
Belitung	6,45	7,15	6,27	6,29	7,56	7,77	7,85	8,38	7,36	8,48
Bangka Barat	2,46	2,75	2,7	2,67	3,05	2,98	2,74	3,08	3,15	3,26
Bangka Tengah	4,86	5,13	4,85	5,02	5,81	6,07	5,64	5,67	5,27	5,46
Bangka Selatan	3,22	3,69	3,52	3,36	3,7	3,92	3,62	3,74	3,87	4,01
Belitung Timur	6,49	7,2	6,52	6,6	7,06	6,81	6,99	7,33	6,68	6,90
Kota Pangkal Pinang	4,55	4,76	4,36	4,25	4,95	4,8	5,02	4,97	4,04	4,15

Sumber: BPS, diolah peneliti, 2023

Data pada tabel.1, selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa posisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka dibawah rata-rata provinsi dan dibawah rata-rata nasional, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka menempati

urutan ke-5 tertinggi. Sementara posisi kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Belitung Timur sebesar 6,49 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah ada di Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,46 persen. Secara rata-rata setiap Kabupaten mengalami penurunan tingkat kemiskinan, namun yang mengalami kenaikan hanya Kota Pangkal Pinang. Dilihat dari kecenderungannya selama 10 tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka hanya sebesar 1,14 persen.

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan fakta dan data yang tersedia maka penulis berkesimpulan masih relevan melakukan kajian, dengan topik pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana besaran pengaruhnya, untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh serta fenomena penyebab terjadinya hubungan atau pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Bangka.

B. Landasan Teori

1. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan Harga Konstan (PDRB-ADHK) dalam penelitian ini peneliti menggunakan PDRB-ADHK. PDRB-ADHK merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah yang dinilai dengan harga tahun dasar tertentu. Laju PDRB-ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (BPS, 2022).

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. (BPS, 2020)

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (BPS, 2020).

4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah seseorang tergolong dalam kategori miskin bila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs), dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020).

C. Metode Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jadwal dari tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan 30 Nopember 2023. Jenis penelitian adalah penelitian kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan model *Sequential Explanatory*. Menurut Cresswell dalam (Sugiyono, 2017) model *Sequential Explanatory* adalah metode penelitian kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Diawali dengan menggunakan metode kuantitatif, selanjutnya dengan metode kualitatif. Peranan metode kuantitatif adalah untuk memperoleh data kuantitatif, sedangkan metode kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah atau menggugurkan data kuantitatif yang telah didapat. Pengumpulan data sekunder berupa data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2013 – 2022, yaitu data PDRB, IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sedangkan pengumpulan data primer berupa data kualitatif bersumber dari hasil wawancara ke Dinas/ Instansi yang relevan dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Studi pustaka; untuk mendapatkan data sekunder lainnya melalui buku dipergustakaan, internet maupun media lainnya seperti, penelitian terdahulu, teori, konsep dan definisi yang relevan dengan variabel dalam penelitian ini.

Populasi terkait variabel yang diteliti adalah dimulai dari data tersebut dipublikasikan atau pemekaran wilayah Kabupaten Bangka (tahun 2005) sampai dengan tahun terakhir (tahun 2022). Penelitian ini menggunakan sampel data selama 10 tahun terakhir (2013-2022), baik variabel bebas maupun variabel tak bebasnya, menggunakan metode *purposive sampling* (pertimbangan). Pertimbangan yang dimaksud adalah ketersediaan data, homogenitas data, normalitas data, dan linieritas data sehingga yang dijadikan sampel time series data sepuluh tahun terakhir. Analisis data dilakukan 2 tahap; tahap pertama untuk data kuantitatif menggunakan analisis regresi sederhana, model persamaan regresi yang digunakan sbb: $Y = a + b_1 (X)$. Uji Normalitas menggunakan model *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Linieritas menggunakan *Grafik Scatter Plot*, model dikatakan linear jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk pola tertentu (acak). Uji Signifikansi dengan uji t, bertujuan untuk mengetahui apakah PDRB, IPM dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, secara parsial. Dilanjutkan dengan analisis Koefisien Korelasi (R) untuk melihat Hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, dan analisis Koefisien Determinasi (R²) untuk melihat seberapa besar tingkat Pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Analisis tahap kedua, adalah analisis kualitatif bertujuan untuk memverifikasi, membuktikan, menjelaskan, memperdalam dan memperluas hasil analisis kuantitatif.

D. Hasil Penelitian

1. Uji normalitas variabel PDRB dan variabel tingkat kemiskinan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

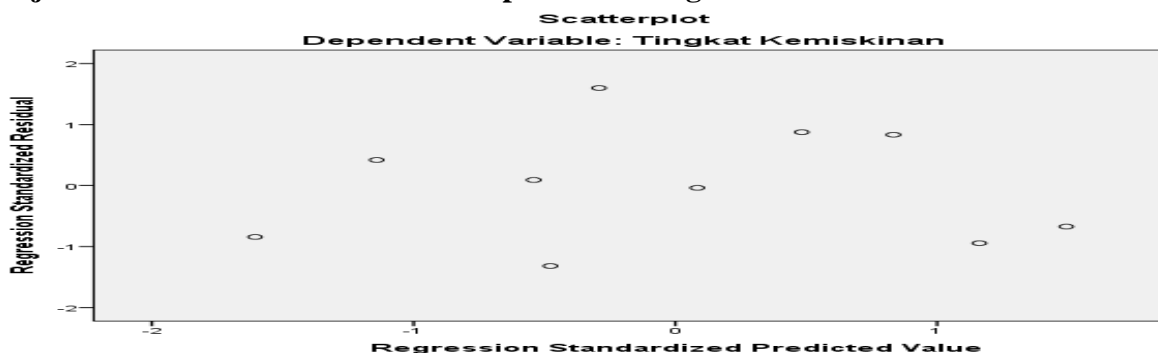
	PDRB	Kemiskinan	Standardized Residual
N	10	10	10
Test Statistic	,115	,158	,162
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{e,d}	,200 ^{e,d}	,200 ^{e,d}

Sumber: output SPSS

Gambar.1 hasil uji normalitas variabel PDRB dan tingkat kemiskinan

Data pada gambar 1, nilai signifikansi variabel PDRB dan variabel kemiskinan adalah sama yaitu $0,200 > 0,05$, maka distribusi data kedua variabel tersebut adalah normal. Kesimpulannya sudah memenuhi persyaratan uji asumsi asumsi klasik.

2. Uji linieritas variabel PDRB terhadap variabel tingkat kemiskinan



Sumber: output SPSS

Gambar.2 hasil uji linieritas variabel PDRB dan tingkat kemiskinan

Gambar.2, hasil uji dengan grafik scatterplot, menunjukkan grafik dengan pola yang acak, maka dapat dikatakan bahwa hubungan variabel PDRB terhadap variabel tingkat kemiskinan adalah linier.

3. Koefisien Korelasi dan koefisien determinasi PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772 ^a	,596	,545	,30661

a. Predictors: (Constant), PDRB, b. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber: output SPSS

Gambar.3 koefisien korelasi dan determinasi variabel PDRB dan tingkat kemiskinan

Data pada gambar.3 nilai koefisien korelasi variabel PDRB terhadap tingkat kemiskinan 0,772, artinya hubungannya erat. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,596 atau 59,6 persen, artinya pengaruhnya sebesar 59,6 persen.

4. Hasil persamaan regresi dan uji t variabel PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,030	,864		9,296	,000
PDRB	-3,120E-7	,000	-,772	-3,435	,009

Dependent Variable: kemiskinan

Sumber: output SPSS

Gambar.4 persamaan regresi dan uji t variabel PDRB dan tingkat kemiskinan

Data pada gambar.4 dapat dibentuk persamaan regresi: $Y = 8.030 - 3,120E-7 X$, nilai signifikansi uji $t = 0,009 < 0,05$, artinya pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang negatif dan signifikan.

5. Uji Normalitas Variabel IPM Terhadap tingkat kemiskinan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	IPM	Tingkat kemiskinan	Standardized Residual
N	10	10	10
Test Statistic	,206	,158	,170
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

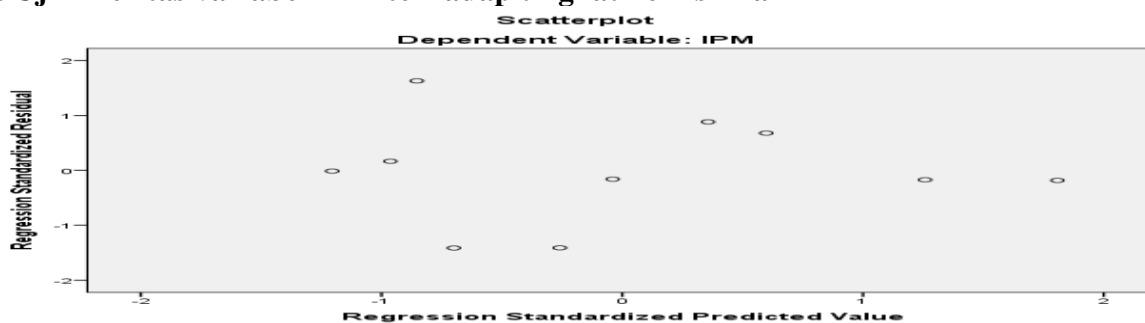
a. Test distribution is Normal.

Sumber: output SPSS

Gambar.5 hasil uji normalitas variabel IPM dan tingkat kemiskinan

Dari data pada gambar.5, nilai signifikansi variabel IPM dan variabel tingkat kemiskinan adalah sama yaitu $0,200 > 0,05$, maka distribusi data normal. Kesimpulannya karena kedua data variabel berdistribusi normal maka layak digunakan dalam penelitian ini.

6. Uji linieritas variabel IPM terhadap tingkat kemiskinan



Sumber: output SPSS

Gambar.6 hasil uji linieritas variabel IPM dan tingkat kemiskinan

Dari Gambar.6, hasil uji dengan grafik scatterplot, menunjukkan grafik dengan pola yang acak, jadi hubungan variabel IPM terhadap variabel tingkat kemiskinan adalah linier.

7. Koefisien Korelasi dan koefisien determinasi IPM terhadap tingkat kemiskinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,782 ^a	,612	,563	,30053

a. Predictors: (Constant), IPM, b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan.

Sumber: output SPSS

Gambar.7 Koefisien Korelasi dan Determinasi IPM dan tingkat kemiskinan

Gambar.7 menunjukkan nilai koefisien korelasi IPM terhadap kemiskinan sebesar 0,782, sehingga hubungan antara IPM dengan tingkat kemiskinan erat. Sementara nilai koefisien determinasi IPM terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0,612 atau 61,2 persen, artinya Pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan sebesar 61,2 persen.

8. Persamaan regresi dan uji t, variabel IPM terhadap tingkat kemiskinan

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,561	5,487		4,476	,002
	IPM	-,273	,077	-,782	-3,551	,008

a. Dependent Variable: Tingkat kemiskinan

Sumber: output SPSS

Gambar.8 hasil persamaan regresi dan uji t variabel IPM dan tingkat kemiskinan

Dari data pada gambar.8, persamaan regresinya adalah $Y = 24,561 - 0,273X$, nilai signifikansi uji t = 0,008 < 0,05, sehingga pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang negatif dan signifikan.

9. Uji normalitas Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

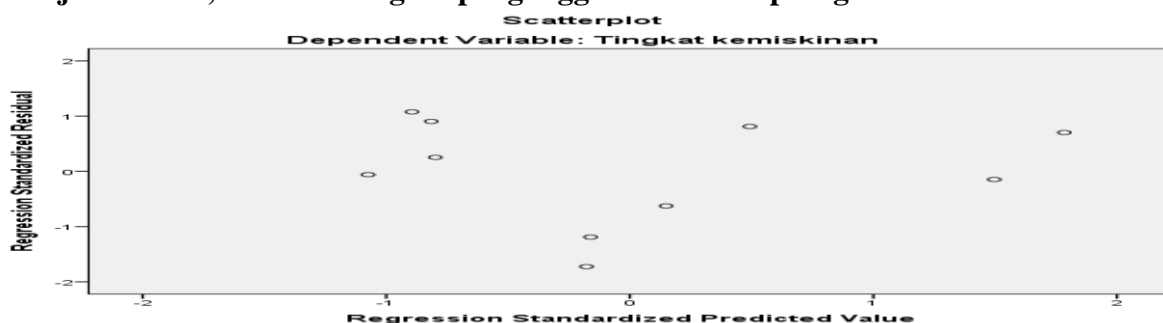
	Tingkat pengangguran	Tingkat kemiskinan	Standardized Residual
N	10	10	10
Test Statistic	,188	,158	,172
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

Sumber: output SPSS

Gambar.9 hasil uji normalitas variabel tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan

Data pada gambar.9, nilai signifikansi variabel tingkat pengangguran dan variabel tingkat kemiskinan adalah sama, yaitu 0,200 > 0,05, maka distribusi data normal, sehingga kesimpulannya karena kedua data variabel berdistribusi normal maka layak digunakan dalam penelitian ini.

10. Uji linieritas, variabel tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan



Sumber: output SPSS

Gambar.10 hasil uji linieritas variabel tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan

Informasi pada gambar.10, dari grafik scatterplot membentuk pola yang acak, maka hubungan variabel tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan adalah linier, sehingga layak digunakan dalam penelitian ini.

11. Analisis Koefisien Korelasi dan analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,274 ^a	,075	-,041	,46387

Predictors: (Constan), tingkat pengangguran Predictors, Tingkat kemiskinan

Sumber: output SPSS

Gambar.11 koefisien korelasi dan determinasi tingkat pengangguran & kemiskinan

Gambar.11 memberikan petunjuk bahwa nilai koefisien korelasi tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan hanya sebesar 0,274, sehingga hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan sangat tidak erat. Sementara nilai koefisien determinasi tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan hanya sebesar 0,075 atau 7,5 persen, artinya Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan hanya mencapai angka sebesar 7,5 persen.

12. Persamaan regresi dan Uji t, tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,681	,519		9,026	,000
Tingkat pengangguran	,070	,087	,274	,806	,444

a. Dependent Variable: Tingkat kemiskinan

Sumber: output SPSS

Gambar.12 persamaan regresi, uji t variabel tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan

Pada gambar.12, persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 4,681 + 0,070 X$, uji $t = 0,444 > 0,05$, menunjukkan bahwa hubungan tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan adalah positif. Sedangkan apabila dilihat dari hasil uji t, hubungan atau pengaruhnya tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

E. Pembahasan

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan

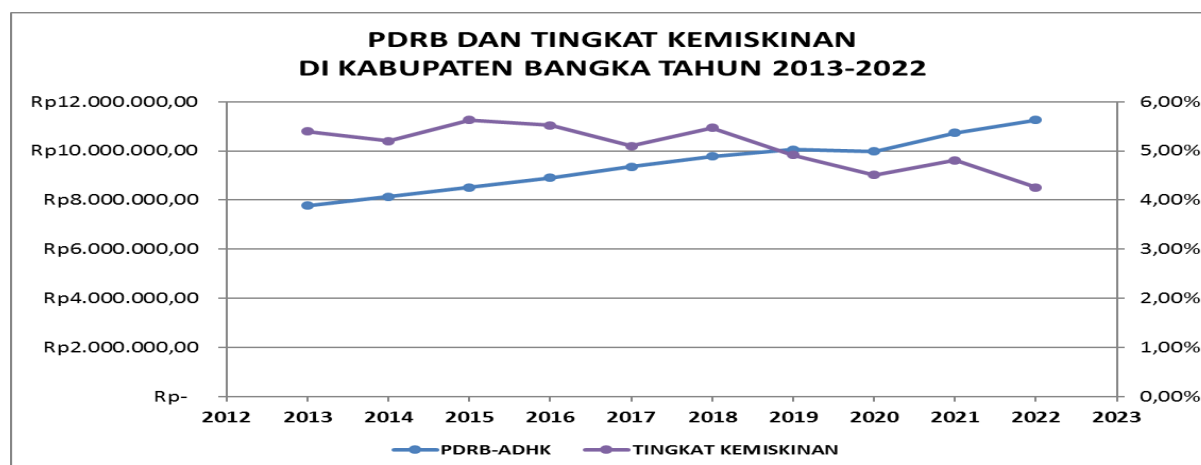
Persamaan regresi, tingkat kemiskinan = $8,030 - 3,120E-7$ PDRB, maknanya adalah apabila nilai PDRB bertambah 1 satuan, maka Tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,000000312 atau $0,000000312 \times 1.000.000 = 0,312$ persen. Dilihat dari nilai koefisien regresi yang bertanda negatif dan hasil uji signifikansi dengan uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$, sehingga sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. Besaran pengaruh variabel PDRB terhadap tingkat kemiskinan sebesar 59,60 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 40,40 persen.

Sejalan dengan pendapat Kuznet dalam (Mufid Cholili & Pudjihardjo, 2014), menyatakan korelasi pertumbuhan PDRB dengan kemiskinan sangat kuat, di awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan di akhir pembangunan tingkat kemiskinan berangsur-angsur menurun. Penelitian (Siregar & Wahyuniarti, 2008) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah, terjadi peningkatan pendapatan dan ketimpangan distribusi pendapatan rendah, akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya (Wongdesmiwati, 2009) tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan adanya investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kuznets dalam (Jhingan, 2010), menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB-ADHK mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tersedianya lapangan kerja bagi pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian (Martini & Woyanti, 2022b), dan penelitian (Yudi Rois Panggabean, 2013) yang menyatakan bahwa variabel PDRB-ADHK berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan PDRB-ADHK akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Samarinda. Ada beberapa penyebab diantaranya kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan angka kemiskinan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Damanik & Sida, 2020), (Maulidina, *et al.* 2022) dan (Azriansyah, Z, 2022), yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. (Rahman Suleman & Hasibuan, 2021) PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padang sidimpuan. Begitu juga penelitian (Andhykha *et al.*, 2018) menyatakan terdapat hubungan positif dan signifikan antara pertumbuhan PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini merupakan sebuah indikasi pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan tidak merata dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat.

Gambar dibawah ini akan menyajikan trend selama 10 tahun terakhir antara PDRB dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka.



Sumber: BPS, diolah peneliti, 2023

Gambar.13 perkembangan PDRB dan tingkat kemiskinan

Gambar.13 menunjukkan bahwa trend PDRB Kabupaten Bangka selama 10 tahun terakhir menunjukkan arah yang positif, artinya PDRB meningkat dengan seiring waktu dan tingkat kemiskinan menunjukkan arah yang menurun. Dari hasil wawancara dan Fokus Grup Diskusi, adanya hubungan atau pengaruh negatif antara PDRB dengan tingkat kemiskinan disebabkan Produksi barang atau jasa yang dihasilkan di suatu wilayah sebagian besar akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Adanya peningkatan PDRB tentunya akan diiringi oleh peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Untuk meningkatkan perekonomian melalui peningkatan PDRB, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya adalah pertama mendorong laju produksi sektor unggulan daerah terutama perkebunan, pertanian, kelautan, perikanan, industri

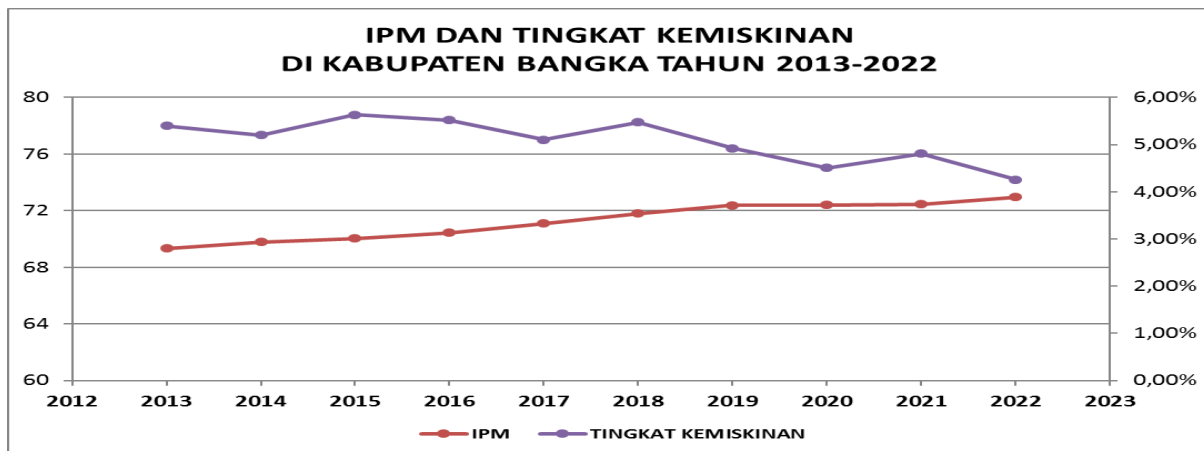
dan pariwisata. Kedua pemanfaatan resi gudang bagi Petani, ketiga revitalisasi badan usaha milik daerah (BUMD). Keempat mempercepat ground breaking zona rencana kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Bangka. Kelima mendorong investasi agro industri dan industri hilir pertanian yang akan berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian daerah. Keenam merubah struktur pasar oligopoli pada komoditi pertanian. Ketujuh memperpendek rantai pemasaran pada komoditi pertanian. Kedelapan menghilangkan fenomena principal agent pada produk pertanian. Kesembilan proteksi input dan output produksi, kesepuluh stimulus fiskal untuk sektor pertanian dan UMKM. Kesebelas mendorong peran pemerintah desa dalam perekonomian, kedua belas desentralisasi kewenangan perijinan tertentu kepada kecamatan. Ketiga belas penguatan lembaga pelayanan perijinan dan pelayanan modal, Keempat belas menjaga stabilitas inflasi daerah, Kelima belas meningkatkan koordinasi kebijakan perekonomian antar daerah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Persamaan regresi dari hasil penelitian adalah: tingkat kemiskinan= $24,561 - 0,273 \text{ IPM}$, maknanya adalah apabila nilai IPM bertambah 1 point, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,273 persen. Dilihat dari nilai koefisien regresi yang bertanda negatif dan hasil uji signifikansi dengan uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$, sehingga sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. Besaran pengaruh variabel IPM terhadap tingkat kemiskinan sebesar 61,2 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 38,8 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori (Kanbur *et al.* 1999) yang menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan sebagai indikator yang termasuk dalam pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dapat menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat kemudian menyebabkan tingkat kemiskinan berkurang.

Penelitian dengan temuan yang sama dengan peneliti (Mufid Cholili & Pudjihardjo, 2014) menunjukkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian (Pitaloka, *et al.* 2022), (Azriansyah, Z, 2022), (Maulana, *et al.* 2022), (Martini & Woyanti, 2022b) dan (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). (Ramadhan Zulfi *et al.* 2023) penelitian di Provinsi Sumatera Utara, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menurut (Fadilah, 2016) IPM merupakan pengukur pembangunan manusia secara efektif, peningkatan IPM secara umum kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya penelitian (Leonita & Kurnia Sari, 2019) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Gambar dibawah ini merupakan ilustrasi untuk dapat memahami dampak atau pengaruh dari variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka selama 10 tahun terakhir.



Sumber: BPS, diolah peneliti, 2023

Gambar.14 perkembangan IPM dan tingkat kemiskinan

Gambar.14 menunjukkan trend IPM yang menaik selama 10 tahun terakhir, dan tingkat kemiskinan menunjukkan trend menurun. Dari hasil wawancara dan Fokus Grup Diskusi menemukan bahwa IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan kehidupan yang layak (pendapatan). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, mengukur dimensi pendapatan digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Tabel.2 Peningkatan atau penurunan Tingkat Kemiskinan dan IPM beserta indikatornya di Kabupaten Bangka, tahun 2013-2022

Uraian	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
1. Angka Harapan Hidup	Tahun	70,45	71,37	+ 0,92
2. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,88	8,27	+ 0,39
3. Harapan Lama sekolah	Tahun	12,01	12,80	+ 0,79
4. Pengeluaran perkapita	Rupiah	10.647.000	12.863.000	+ 2.216.000
5. IPM	Poin	69,34	72,95	+ 3,61
6. Tingkat Kemiskinan	Persen	5,40	4,26	-1,14

Sumber: BPS, Diolah Peneliti

Selama 10 tahun terakhir angka IPM meningkat dari 69,34 menjadi 72,95, atau meningkat sebesar 3,61 point. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan angka harapan hidup 0,92 tahun yakni dari 70,45 tahun, menjadi 71,37. Selanjutnya harapan lama sekolah juga meningkat 0,79 tahun dari 12,01 menjadi 12,80 tahun, pengeluaran perkapita penduduk pun meningkat cukup signifikan sebesar Rp. 2.216.000 dari Rp. 10,647.000 menjadi Rp. 12.863.000. Dampak dari adanya peningkatan IPM melalui indikator tersebut adalah menurunnya tingkat kemiskinan, sebesar 1,14 persen dari 5,40 menjadi 4,26 persen. Peningkatan angka IPM tersebut, tentunya merupakan buah dari hasil upaya dari berbagai pihak utamanya adalah dukungan regulasi berupa kebijakan melalui program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan program percepatan penanggulangan kemiskinan, mencakup 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan. Bidang pengembangan ekonomi kerakyatan adalah penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan Perlindungan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta berbasis usaha mikro.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan dimensi dibidang kesehatan ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan masyarakat dalam program/ Kegiatan seperti: Program Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang (JKSS), untuk penduduk yang memerlukan biaya perawatan rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan apapun. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk penduduk yang tidak mampu, melalui kuota BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) yang berasal dari APBD Kabupaten dan Provinsi. Untuk tahun 2023 bagi masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS (JKN), masyarakat yang tidak mampu, tidak mempunyai BPJS/BPJS tidak aktif, berdasarkan klaiman rumah sakit. Disalurkan melalui Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sumber dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus -dana alokasi khusus non fisik.

Upaya dalam meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan pihak Pemerintah telah melakukan upaya meningkatkan pelayanan, fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Diantaranya melalui program/kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, C, pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan, pemberian beasiswa IP, STTP Magelang, STTP Yogyakarta, Medan dan Universitas Jakarta. Penyediaan program beasiswa bagi Pelajar tidak mampu, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar. Kegiatan Pengelolaan Dana Bos siswa Sekolah Dasar, siswa SMP.

Dimensi pendapatan ditingkatkan dengan pemerataan ekonomi, perbaikan fasilitas umum dan pemberdayaan, perluasan lapangan pekerjaan sehingga setiap penduduk dapat meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, kegiatan pengadaan bantuan pangan bagi keluarga miskin non BPNT. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, kegiatan pengentasan/penanggulangan keluarga sangat miskin (KSM/PKH), kegiatan pengendalian dan pengawasan bantuan pangan non tunai. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan pengadaan tambahan kebutuhan bagi penyandang disabilitas, kegiatan pengadaan makanan tambahan bagi Lanjut Usia (LANSIA) non potensial.

Program pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Kesejahteraan Sosial, kegiatan pendidikan dan pelatihan KUBE. Program Pemberdayaan sosial dengan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan keningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan Program Rehabilitasi sosial, kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu. Program perlindungan dan Jaminan sosial, dengan kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah Provinsi ikut berpartisipasi memberikan dana bantuan desa, untuk menjadi usaha yang produktif dan melibatkan masyarakat kurang mampu, dan melalui BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak usaha yang ada di desa. Disamping itu beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin,

diantaranya Dinas Koperasi dan UKM yang memberikan pelatihan untuk menumbuhkan wirausaha. Melakukan pendampingan dalam mengakses permodalan, baik itu melalui kerjasama dengan PT Timah maupun Bank. Kerjasama dengan stakeholder melalui program CSR, untuk mendukung prioritas dalam mengurangi kemiskinan.

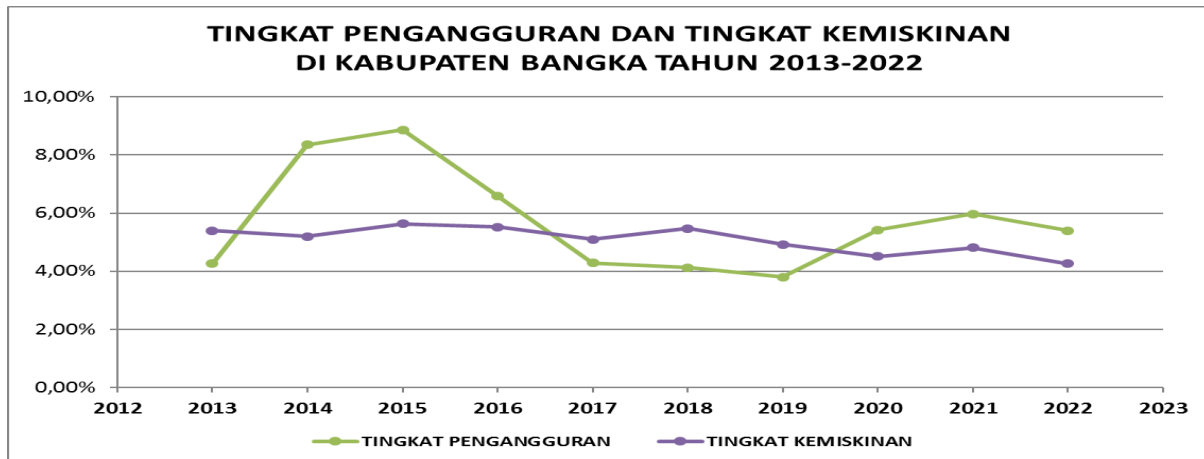
Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan

Persamaan regresi dari hasil penelitian adalah: tingkat kemiskinan = $4,681 + 0,070$ tingkat pengangguran, jika dilihat dari koefisien regresinya yang bertanda positif maknanya adalah apabila tingkat pengangguran meningkat/turun sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan meningkat/turun sebesar 0,070 persen. Namun dari hasil uji signifikansi dengan uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,444 > 0,05$, menandakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. Temuan pada hasil penelitian ini bertentangan dengan teori, yang menyatakan tingkat kemiskinan akan bergerak searah dengan tingkat pengangguran. Penelitian di Nigeria, oleh Osinubi dalam (Yarlina Yacoub, 2012) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran naik, tingkat kemiskinan juga naik sebaliknya tingkat pengangguran turun maka tingkat kemiskinan juga turun. Begitu juga dengan pendapat (Sukirno, 2009) yang menyatakan bahwa Pengangguran berdampak menurunkan pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kesejahteraan yang mereka capai. Artinya dengan beragam kebutuhan masyarakat membuat mereka berusaha untuk memenuhinya, dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, maka kebutuhan mereka tidak terpenuhi sehingga dikategori orang miskin dan mengakibatkan tingkat kemiskinan pun meningkat.

Temuan yang sama hasil penelitian ini adalah dengan (Dewi Martini & Nenek Woyanti, 2022) yang menyatakan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (Maratus Sholikhah *et al.* 2021) pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. Penelitian (Aldino, 2018) yang menunjukkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebab naik turunnya tingkat pengangguran tidak berdampak pada tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan (Mufidah, 2022) pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian dengan temuan yang berbeda, diantaranya dengan (Annisa & Sutjipto, 2017), (Devira.D, & Windy, 2022), (Cholili 2014), (Azriansyah . Z, 2022) yang menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Yarlina Yacoub, 2012) menemukan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan adalah negatif dan signifikan untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pengaruh negatif disebabkan oleh tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian melibatkan hampir seluruh anggota keluarga, namun penghasilan yang rendah. Artinya walaupun tingkat pengangguran yang rendah, namun mereka tetap saja miskin, karena penghasilannya rendah. Son dan Kakwani dalam (Yarlina Yacoub, 2012) dengan menggunakan data Brazil, korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi signifikan. Oshima menyatakan rumah tangga miskin hampir tidak mungkin menjadi penganggur dikarenakan di Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi penganggur. Sehingga pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sama halnya dengan penelitian (Bintang 2018) dimana setiap kenaikan TPT akan menambah persentase penduduk miskin.

Gambar berikut menunjukkan kecenderungan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka selama 10 tahun terakhir.



Sumber: BPS, diolah peneliti, tahun 2023.

Gambar.15 perkembangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan

Jika diamati gambar.15 diatas dan berdasarkan temuan hasil Fokus Grup Diskusi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang meningkat tidak serta merta diikuti oleh meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. Fenomena yang terjadi adalah di karenakan pengangguran tersebut bukanlah dari kalangan penduduk miskin, artinya disatu sisi ada anggota keluarga sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan penghasilan yang diinginkan atau mempersiapkan usaha tapi disisi lain biaya hidup ditanggung oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain (Retnowati, 2015). Disamping itu adanya ketidakseimbangan antara penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan lapangan perkejaan, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan pihak pemberi kerja. Antara teknologi yang dibutuhkan dengan kemampuan individu yang tidak menguasai teknologi, sehingga akan tersingkir dalam persaingan dan antara tujuan perusahaan dengan faktor perilaku individu yang belum selaras. Pada saat pandemi covid-19 pengangguran mengalami peningkatan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, namun tidak disertai peningkatan kemiskinan disebabkan adanya peran pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial. Disamping itu adanya pengaruh harga timah yang sedang tinggi, sehingga sebagian masyarakat walaupun menganggur masih memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhannya.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka sebagian besar (79,42 %) berada di daerah perkotaan, alasan utamanya disamping sedang mencari pekerjaan juga merasa tidak mungkin dapat pekerjaan. Sementara pengangguran di pedesaan hanya 20,58 % disebabkan sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Rendahnya pengangguran di pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan, disebabkan alternatif peluang lapangan pekerjaan lebih banyak di pedesaan khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan timah. Dilihat dari tingkat pendidikan pengangguran terbuka, terdiri dari tamatan Sekolah Menengah Atas (33,16 %), Sekolah Dasar (24,69 %), tidak tamat SD (19,56 %), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (18,57), sisanya (4,02 %) tamatan Diploma, Akademi dan Universitas (Sakernas BPS, 2022).

Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan pihak Pemerintah Kabupaten Bangka, melalui dinas terkait dengan ketenaga kerjaan adalah program penempatan tenaga kerja berupa informasi lowongan pekerjaan dari pihak perusahaan untuk warga setempat. Selanjutnya Program pelatihan kerja untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi antara pihak pemberi kerja dengan pihak pencari kerja seperti tidak seimbangny skill yang dimiliki dengan kebutuhan pihak pemberi kerja,

berkolaborasi dengan pihak Balai Latihan Kerja Kabupaten Bangka. Balai Latihan Kerja Pemerintah Provinsi juga telah membuka kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Bangka yang berminat untuk mengikuti pelatihan dengan berbagai jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Program hubungan industrial, adalah untuk melindungi tenaga kerja dari pemutusan kerja secara sepihak. Dari sisi pengembangan ekonomi masyarakat desa, melalui program peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan perencanaan pembangunan industri. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diutamakan untuk masyarakat miskin. Selain itu untuk mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan wilayah pedesaan melalui penyaluran dana desa yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.

F. Kesimpulan dan Saran

Selama periode penelitian dari tahun 2013-2022, Kabupaten Bangka yang merupakan kabupaten Induk telah berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai upaya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sangat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, kelurahan/Desa serta pihak swasta dan masyarakat. Melalui berbagai program/kegiatan pemberdayaan ekonomi dan berbagai bantuan yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus meningkatkan angka PDRB dan IPM maka perlu upaya sebagai berikut:

1. Berdayakan masyarakat tak mampu dengan membangun budaya swadesi (Do it Yourself) melalui penyebaran pengetahuan teknik pembuatan barang dan jasa secara mandiri, lewat jalur pendidikan/pemasyarakatan.
2. Memperbesar investasi padat pekerja berkesinambungan.
3. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro, dengan dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar.
4. Memperluas ekonomi pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat, Pemerintah Kabupaten Bangka atas bantuan, sehingga artikel ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Ucapan terima kasih juga kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, Dinas yang terkait baik di Pemerintah Provinsi dan di Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah membantu kami memberikan data/informasi yang kami butuhkan dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya juga kepada para reviewer, kami sangat berterima kasih atas bantuannya dalam kelengkapan dan kelancaran artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Suleman, Abdurrozzaq Hasibuan. (2021), Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kota Padang Sidempuan, *Buletin Utama Teknik* Vol. 17, No. 1, September 2021. file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/4313-10967-1-SM-1.pdf
- Aldino. (2018). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Andhykha, Ridho *et al.* (2018) Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2018, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33(2), Juli 2018, 113-123 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/issue/view/152>
- Annisa, R., & Sutjipto, H. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Banten, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, 12(2), 301. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i2.4464>
- Aria Bhaswara Bintang., & Nenek, Woyanti. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah (2011 -2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 33 No.1, 20–28
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Astuti, W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 1(3), 194–214. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i3.1286>
- Azriyansyah, Zikri (2022). Analisis Pengaruh IPM, PDRB dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode tahun 2017 – 2021, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 3 September 2022, hal 225-238. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/308>
- BPS Kabupaten Bangka. (2012). *Bangka Dalam Angka tahun 2012-2021*, Sungailiat: Pemerintah Kabupaten Bangka.
- BPS. (2020). Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.
- BPS. (2020). Konsep Kemiskinan menurut BPS <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- BPS. (2020). Konsep Pengangguran menurut BPS <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>.
- BPS. (2022). Konsep Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut BPS. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7077>
- Cangara Hafied. (2020). *Komunikasi Pembangunan: Telaah untuk Memahami Konsep, Filosofi, serta Peran Komunikasi terhadap Pembangunan dan Pembangunan Komunikasi dalam Era Digital*, Depok: Rajawali Pers.
- Cholili, F. M. (2014). Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia), *Jurnal Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(5), 557–577.
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Mamola, R. M., Haya, H., & Indriyani, D. (2021). Determinant Factors Poverty of Relativity in Banten Province: A Panel Data Analysis. *Ecoplan*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.387>

- Devira D, Windy, D. D. (2022). Analisis Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota selama pandemi covid-19 di Provinsi Banten, 1(4)
- Dewi Martini¹, Nenek Woyanti (2022). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020), *Jurnal BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* Vol. V No. 2, Bulan Juli Tahun 2022, hal. 23-32 <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/biceser/article/viewFile/345/246>.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak, *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>, file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/3780-File%20Utama%20Naskah-8702-1-10-0220427.pdf
- Fadilah (2016). Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–30.
- Haq M.U. (1996). *Reflection on Human Development, 1 st edition*, New York: Oxford University Press.
- Hendra, Roy, (2010). Determinan Kemiskinan Absolut Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2007, tesis FE.UI, Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI. file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/digital_131195-T%2027312-Determinan%20kemiskinan-HA-1.pdf
- Ilmi, Maftuh Bahrul. (2021) Pengaruh PDRB, IPM dan TPT Terhadap Kemiskinan di Lima Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Periode 2010-2019. Skripsi. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13561/1/>
- Jhingan. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kanbur, Ravi, & Squire, L. (1999). *The Evolution Of Thinking About Poverty*.
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), Oktober 2019, hal.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro Ekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga
- Maratus Sholikhah, Niniek Imaningsih, Riko Setya Wijaya. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 7 Juli 2021. <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/275/437>
- Martini, D., & Woyanti, N. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal BISECER*, v(2), 23–32.
- Maulana, B. F., Farhan, M., & ... (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2019-2021, *Jurnal Ekonomi, Bisnis*, 4(2), 155–163. [https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/81%](https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/81%7)
- Maulidina, S., Zahara, V. M., & Sutjipto, H. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan pada sektor Pertanian di Indonesia Bagian Barat, *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 257–269. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.86>

- Muhammad Ramadhan Zulfi1 *et al.* (2023). Analisis Pengaruh IPM, Pengangguran, dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 26(1):7-16, March 2023, DOI:10.31941/jebi.v26i1.2817. https://www.researchgate.net/publication/369506289_Analisis_Pengaruh_IPM_Pengangguran_dan_PDRB_Terhadap_Kemiskinan_di_Provinsi_Sumatera_Utara_Tahun_2017-2021
- Mulyo, Panca Dwi.(2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa tahun 2010-2016, *Jurnal UII*, tahun 2018. <https://dspce.uui.ac.id/handle/123456789/6363>.
- Noor Zuhdiyati., & David Kaluge. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11 (2), 27–31.
- Panggabean, Yudi. Rois. (2013). *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Pitaloka, D. A., Awalluna, K. Z., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pada Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 2(4), 982–988.
- Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Ratna Mufidah, Asrudi, Susiani. (2022). Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kota Jayapura tahun 2010 – 2017, *Jurnal Education and development*, Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022.
- Retnowati, D. (2015). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 47–52.
- Sari, Putri Indah, Sri Muljaningsih dan Kiky Asmara (2021). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5). Mei 2021 <https://doi.org/10.46799/journalsyntaxtransformation.v2i5.271>
- Sari, Saniya, D. D. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata lama sekolah terhadap tingkat penduduk miskin di Indonesia 2020, 1(1), 20–30.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Sen, A. S. (2000). The Income Component of the Human Development Index, *Journal of Human Development*, 1(1) , 83-106.
- Siregar & Wahyuniarti. (2008). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Desember 2007, Vol.4 No. 2, Hal. 211-228.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro ekonomi: Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno. (2009). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sussy Susanti (2013). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat, *Jurnal Matematika Integratif*, Vol.9 No.1, April

- 2013, pp.1-18. <https://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/9374/pdf>
- United Nations Development Programme. (2004). *Human Development Report* New York: UNDP.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Yacoub Yarlina. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3), hal 176-185